

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inovasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi tuntutan organisasi publik baik di pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini seiring dengan berbagai perubahan dan dinamika tuntutan masyarakat. Tingkat urgensi dan keutamaan inovasi kebijakan dalam sektor publik telah mendorong sebagian besar pemerintah dunia untuk menerapkan inovasi kebijakan menuju layanan publik yang prima. Demikian juga dengan pemerintah Indonesia yang juga committed dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik melalui Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang mengatur bagaimana organisasi baik di Kementerian, Lembaga maupun Pemerintah Daerah dalam melakukan inovasi daerah. Dalam hal ini ruang lingkup kebijakan tersebut meliputi inovasi tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik (Suranto et al., 2021).

Munculnya inovasi kebijakan adalah di latar belakang oleh banyaknya kasus permasalahan dalam implementasi kebijakannya. Banyaknya permasalahan publik yang kompleks dan dinamis, memerlukan inovasi kebijakan untuk menyelesaikan persoalan publik secara efektif dan efisien. Inovasi secara relevan dapat digunakan di sektor publik karena fungsi alternatifnya untuk mencari solusi baru atas persoalan lama yang tak kunjung tuntas. Paradigma inovasi kebijakan publik telah menjadi diskursus dan praktik dalam birokrasi pemerintahan. Pada cara pandang tersebut, kebijakan publik ini dapat dipandang sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan saling terkait yang dilakukan oleh pemerintah bersama *stakeholder* dalam

mengatur, mengelola dan menyelesaikan urusan publik, masalah publik dan sumber daya yang ada untuk kepentingan bersama (Mulyadi, 2015).

Perkembangan wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) memberikan dampak luar biasa kepada seluruh lapisan masyarakat. Kasus Covid-19 yang sudah berjalan hampir dua tahun ini masih menjadi tantangan bagi dunia termasuk Indonesia. Penyebaran virus dari Covid-19 ini ditetapkan sebagai bencana non alam¹ oleh pemerintah pada bulan April 2020. Penetapan penyebaran virus ini sebagai bencana tertuang dalam Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional. Pandemi Covid-19 ini telah menimbulkan dampak multi sektor, termasuk memberikan dampak mulai dari segi sosial maupun ekonomi. Disisi lain pandemi Covid-19 ini juga menimbulkan dampak negatif terhadap sektor andalan utama Indonesia yakni pariwisata. Maka dari hal itu, banyak UMKM dan usaha yang berada di sekitar wilayah objek wisata ikut merasakan dampak dari pandemi Covid-19. Hingga pada akhirnya virus Covid-19 ini memaksa para pelaku usaha di sektor pariwisata mengurangi jumlah pekerjaannya, serta membuat tingkat pendapatan daerah dan perekonomian ikut menurun.

Kewenangan daerah² menjadi diskursus masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19 ini. Pemerintah daerah yang dianggap paling dekat dan mengetahui keadaan di daerahnya seharusnya dapat menentukan nasibnya dalam

¹ Dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan ada tiga jenis bencana, yakni bencana alam, non alam dan sosial. Wabah Corona Virus (Covid-19) dikategorikan masuk dalam bencana non alam. Bencana non alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

² Sementara itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan arahan Presiden maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menentukan status keadaan darurat yaitu Siaga Darurat atau Tanggap Darurat. Dengan menetapkan Status Siaga atau Tanggap Darurat Covid-19 berarti pemerintah daerah siap bekerja 24 jam 7 hari dan mengarahkan segala sumberdaya yang ada untuk menyelamatkan rakyat di daerahnya dari penyakit Covid-19.

penanganan pandemi Covid-19 dan tidak hanya bergantung kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah dengan kewenangan dan urgensinya pada daerah memang lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh daerahnya, dan dapat mengambil kebijakan yang dianggap perlu untuk daerahnya.

Pemerintah dapat menggagas beberapa program inovasi untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam konteks pelayanan publik berbasis masyarakat. Kebijakan dan pelayanan publik memerlukan warga masyarakat untuk bekerjasama, dengan maklumat publik. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Kebijakan selalu berhubungan dengan dorongan dan peraturan. Program membutuhkan baik dorongan, ataupun implementasi, dengan adanya program kerja maka suatu organisasi dapat menentukan langkah yang tepat untuk mencapai tujuannya.

Kabupaten Tanah Datar yang berada di Provinsi Sumatera Barat juga merupakan salah satu daerah tujuan wisata masyarakat dengan banyaknya destinasi wisata mulai dari wisata alam, budaya, dan sejarahnya. Pandemi Covid-19 juga turut berdampak terhadap sektor pariwisata di Tanah Datar. Potensi kepariwisataan di Kabupaten Tanah Datar telah memiliki daya tarik yang cukup kuat bagi kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara dengan adanya pandemi Covid-19 ini, sektor pariwisata di Kabupaten Tanah Datar mengalami jumlah penurunan yang cukup drastis. Disamping itu, perkembangan pariwisata Kabupaten Tanah Datar masih sangat tergantung pada keberadaan Istana Basa Pagaruyung, yang sampai saat ini masih belum tergantikan posisinya sebagai ikon pariwisata di Kabupaten Tanah Datar, bahkan di Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian, bukan berarti pengembangan pariwisata hanya difokuskan pada

Istano Basa Pagaruyung saja. Inovasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar dalam pemulihan pariwisata di tengah pandemi yaitu dengan menciptakan wisata unggulan *One Nagari One Event*, yaitu pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan menitik beratkan pada pembangunan sarana dan prasarana pendukung serta infrastruktur pada destinasi wisata yang bertujuan untuk menggali potensi-potensi yang ada pada Nagari serta diharapkan nantinya akan dapat membangkitkan perekonomian pelaku wisata yang ada pada Nagari. *One Nagari One Event* ini adalah suatu bentuk inovasi pariwisata yang mendorong setiap Nagari di daerah Kabupaten Tanah Datar untuk menciptakan satu event guna menunjang kepariwisataan. *One Event One Nagari* ini juga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tanah Datar dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Inovasi dianggap sebagai melakukan sesuatu secara berbeda. Di sektor publik secara khusus, Mulgan dan Albury (2003) dalam (Suranto et al., 2021) mendefinisikan inovasi publik yang sukses adalah penciptaan dan pelaksanaan proses, produk, layanan dan metode baru penyampaian dalam memberikan layanan publik. Dalam hal ini kemudian menghasilkan peningkatan yang signifikan untuk hasil, efisiensi dan efektivitas atau kualitas layanan publik. Sedangkan dengan pakar lain menyoroti pentingnya kreativitas yang berarti bahwa untuk menciptakan cara baru dalam melakukan sesuatu, hal ini sejalan dengan akar ilmu ekonomi dan manajemen yang menganjurkan inovasi sebagai kebaruan dalam tindakan. Para sarjana dengan perspektif kebaruan ini percaya dengan inovasi yang ditekankan dalam konsep kebaruan. Menurut (Yosef et al., 2011) menggaris bawahi bahwa kebaruan sebagai karakteristik inti dari inovasi. Hasilnya tercermin dalam produk

baru, metode produksi, pasar, sumber pasokan dan struktur organisasi. Dan perspektif ini dapat dikelompokkan menjadi definisi berbasis kebaruan.

Berbeda halnya dengan Josef Schumpeter dalam (Edler & Fagerberg, 2017) yang memperkenalkan perbedaan antara penemuan (ide baru tentang bagaimana melakukan sesuatu) dan inovasi (melaksanakannya dalam praktik). Alasan utama perbedaan antara penemuan dan inovasi adalah kesadaran bahwa yang penting secara ekonomi dan sosial bukanlah ide itu sendiri tetapi eksploitasi dalam system ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, jika ingin memaksimalkan kontribusi inovasi terhadap perubahan ekonomi dan sosial tidak cukup hanya berfokus pada apa yang menjelaskan terjadinya suatu kebaruan juga memerlukan pemahaman menyeluruh tentang adopsi dan penerapannya serta eksploitasi selanjutnya. Dalam penelitian (Li et al., 2017) tentang konfigurasi inovasi kebijakan dengan studi komparatif Rusia dan Cina, memaparkan tiga instrumen inovasi kebijakan, yang terdiri dari: *Pertama, Demand Side* merupakan instrumen yang menekankan keterlibatan pihak lain dalam proses inovasi kebijakan. *Kedua, Supply Side* yaitu instrumen yang lebih menekankan pada peningkatan kapasitas organisasi sebagai pelaksana dalam inovasi kebijakan. *Ketiga, Environmental* yang dicirikan dengan mempertimbangkan aspek administrasi. Dalam hal ini berupa prosedur atau peraturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan inovasi kebijakan.

Instrumen inovasi kebijakan harus dirancang dan digabungkan menjadi berbagai cara untuk mengatasi masalah system inovasi hal ini diungkapkan oleh (Borrás & Edquist Charles, 2012) dalam penelitiannya yang melihat bagaimana pemerintah dan lembaga publik di berbagai negara untuk mengeksplorasi sifat politik. Penelitian ini menunjukkan tiga instrumen inovasi kebijakan yang berbeda, yaitu instrumen regulasi, regulasi ini menjadikan hukum sebagai aturan dalam

interaksi selama proses inovasi kebijakan. Hal ini terkait dengan keinginan pemerintah untuk membuat pedoman dalam melakukan inovasi kebijakan. Selanjutnya instrumen ekonomi dan keuangan, agar dalam implementasi inovasi kebijakan, pelaksana memiliki pedoman, instrumen ini melibatkan aspek ekonomi menjadi inovasi kebijakan publik. Dan *Soft Instrument*, kebijakan dibuat berdasarkan permintaan dan kebutuhan masyarakat, yang memberikan rekomendasi atau penawaran perjanjian dan kontrak sukarela. Instrument-instrument ini sangat beragam, tetapi umumnya didasarkan pada pertukaran informasi antar aktor, dan bentuk hierarki kerjasama antara aktor publik dan swasta.

Selanjutnya dalam penelitian (Nasrizal & Yasmeardi, 2020) mengasumsikan bahwa desain kebijakan publik pemerintah daerah yang inovatif tidak akan menjadi pengungkit inovasi kebijakan publik. Desain kebijakan publik pemerintah daerah yang inovatif hanya menggambarkan kebijakan yang menguntungkan bagi kelompok tertentu saja. Kegagalan konsep ini membawa ide untuk mengubah asumsi, yaitu dengan mengubah desain kebijakan publik pemerintah daerah yang inovatif ke desain inovasi kebijakan publik pemerintah daerah.

Berdasarkan analisis peneliti, munculnya inovasi kebijakan adalah di latar belakang oleh banyaknya kasus permasalahan publik. Banyaknya permasalahan publik yang kompleks dan dinamis, memerlukan inovasi kebijakan untuk menyelesaikan persoalan publik secara efektif dan efisien. Maka inovasi kebijakan ini merupakan pembaharuan dari kemampuan dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang baik yang didukung dengan kreativitas birokrasi. Melihat inovasi dari pembaharuan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada, permasalahan terkait pariwisata yang mengalami kemerosotan akibat pandemi Covid-19, Kabupaten Tanah Datar melakukan sebuah kebaruan dalam inovasi kebijakan

pariwisata dengan menciptakan sebuah program unggulan *One Nagari One Event* yaitu untuk menggali, melestarikan dan mempromosikan kearifan lokal melalui potensi yang ada pada Nagari. Menurut peneliti inovasi tentang *One Nagari One Event* ini merupakan salah satu aspek penting yang menarik untuk dikaji dengan melihat apakah inovasi pariwisata dalam bentuk *One Nagari One Event* ini dapat membangkitkan kembali sektor pariwisata dalam menghadapi tantangan akibat pandemi Covid-19, karena sektor pariwisata diyakini akan lebih cepat meningkatkan kembali perekonomian masyarakat. Berdasarkan hal tersebut peneliti melihat bagaimana inovasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar dalam pemulihan sektor pariwisata di tengah pandemi Covid-19 melalui *One Nagari One Event*.

1.2 Perumusan Masalah

Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir seluruh daerah di Indonesia, termasuk Tanah Datar telah terjangkit penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak terhadap kehidupan manusia yang menyebabkan terjadinya gejolak aktivitas ekonomi di seluruh daerah dan berakibat terjadinya resesi. Dampak yang dirasakan juga cukup besar dengan terputusnya masa rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhambatnya aktivitas ekonomi khususnya pada sektor perdagangan dan pariwisata yang berdampak pada pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya menimbulkan koreksi yang cukup dalam terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Kabupaten Tanah Datar yang berada di Provinsi Sumatera Barat juga merupakan salah satu daerah tujuan

wisata (DTW) masyarakat dengan banyaknya destinasi alam, budaya, dan sejarah. Pandemi Covid-19 juga turut berdampak terhadap sektor pariwisata di Tanah Datar. Terlebih, sektor pariwisata selama ini turut menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat setempat dan juga salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Prokabar, 2020).

Sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, Kabupaten Tanah Datar merupakan bagian dari Destinasi Pariwisata Provinsi dengan tema utama sebagai Kawasan pengembangan Minangkabau Tempo dulu (*Ancient Minangkabau Tourism*). Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 tersebut, Kabupaten Tanah Datar juga menjadi bagian dari Kawasan *heritage* Istano Basa Pagaruyung-Nagari Tuo Pariangan-PDIKM dan sekitarnya, serta Kawasan pariwisata alam dan geowisata Singkarak, Pulau Belibis, Danau Kembar dan sekitarnya. Sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2025, Kabupaten Tanah Datar akan menjadikan pariwisata sebagai sektor penggerak perekonomian selain sektor utama pertanian. Pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Tanah Datar tidak hanya berfokus pada pengembangan destinasi wisata alam, namun juga akan mengkombinasikannya dengan mengeksplorasi dan pengembangan wisata yang berbasis adat istiadat, budaya, kearifan lokal dan berbagai keragaman atraksi kesenian yang dimiliki untuk menambah daya tarik wisata di daerah ini.

Kabupaten Tanah Datar memiliki keberadaan potensi pariwisata yang secara historis sangat strategis, yang mana Kabupaten Tanah Datar ini terkenal dengan pusat kebudayaan orang Minangkabau dengan peninggalan sejarah kerajaan Minangkabau, di sisi lain Kabupaten Tanah Datar juga kaya dengan benda-benda

sejarah budaya yang bahkan berumur ratusan tahun yang sampai saat ini terpelihara dengan baik. Disamping itu ada suatu keyakinan bahwa Kabupaten Tanah Datar ini sebagai tempat asal mula suku Minangkabau yang memiliki tempat sejarah, yang mana masih banyak tempat peninggalan sejarah di Minangkabau, dan masyarakatnya dikenal kuat memegang ajaran adat Minangkabau dan agama islam. Potensi budaya Minangkabau yang dinilai kuat dan memiliki daya tarik wisatawan tersendiri karena peninggalan sejarah Minangkabau, zaman penjajahan, dan sebagainya.

Sebagai suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW), potensi kepariwisataan di Kabupaten Tanah Datar telah memiliki daya Tarik cukup kuat bagi kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara karena dilihat dari data jumlah objek wisata yang ada masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar termasuk salah satu Kabupaten yang memiliki jumlah potensi objek wisata yang cukup banyak dan beragam yang terdiri dari 176 objek wisata yaitu objek wisata alam, wisata sejarah, dan wisata budaya. Produk objek wisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang cukup beragam, selain potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata sejarah juga terdapat potensi atraksi budaya masyarakat yang berupa kesenian-kesenian rakyat, permainan rakyat, upacara adat, legenda/cerita rakyat yang dapat ditampilkan untuk memperkaya pengalaman wisatawan yang datang ke obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Tanah Datar (Hendrita, 2017). Sehingga dalam hal ini seharusnya mampu menjadi bahan kebijakan bagi pemerintah daerah yang khususnya untuk memperbaiki dan membawa sektor pariwisata daerah menjadi lebih baik.

Permasalahan pokok dalam bidang pariwisata adalah pengelolaan objek wisata belum dikelola secara optimal baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pariwisata diharapkan merupakan salah satu sektor penting dalam menunjang perekonomian masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Tujuan pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah mewujudkan Kabupaten Tanah Datar sebagai destinasi pariwisata yang unggul berbasis agama, budaya dan sumber daya alam. Kekuatan yang dimiliki Kabupaten Tanah Datar di sektor pariwisata adalah banyaknya destinasi-destinasi wisata alam, wisata kuliner dan wisata budaya yang semakin ramai dikunjungi wisatawan. Adapun permasalahan pembangunan (aspek fokus) pada kepariwisataan di Kabupaten Tanah Datar yaitu:

1. Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata unggulan.
2. Belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan.
3. Masih rendahnya daya saing destinasi pariwisata unggulan.
4. Belum optimalnya kualitas sarana prasarana destinasi pariwisata.
5. Belum melembaganya kelompok sadar wisata baik pada masyarakat lokal, dan pelaku kepariwisataan.
6. Masih rendahnya pemahaman dan kapasitas masyarakat untuk mendukung kepariwisataan di setiap zona pengembangan wisata.
7. Menurunnya jumlah wisatawan dan kontribusi PAD dari sektor pariwisata akibat pembatasan kegiatan masyarakat di tengah pandemic Covid-19.
8. Masih rendahnya lama tinggal wisatawan.
9. Terbatasnya promosi dan pelaksanaan event kepariwisataan.

Saat ini jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Seperti yang diungkapkan oleh Eka Putra

selaku Bupati Tanah Datar dalam (Metro, 2021) sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang paling berdampak pandemi Covid-19, pemberlakuan berbagai pembatasan perjalanan dan pembatasan *event* untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan kunjungan wisatawan secara drastis. Selanjutnya, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanah Datar Abdul Hakim mengungkapkan, pandemi Covid-19 yang melanda secara otomatis mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tanah Datar. Dampak dari pandemi Covid-19 ini menyebabkan berhentinya roda perekonomian masyarakat yang memang bertumpu pada sektor kepariwisataan yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 1.1
Daftar Kunjungan Wisatawan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Wisatawan		Total
	Domestik	Mancanegara	
2019	1.176.087	42.489	1.218.576
2020	551.085	3.508	554.593
2021	691.161	16	691.177

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 2021

Berdasarkan Tabel 1.1, yang bersumber dari Disparpora Kabupaten Tanah Datar terjadi penurunan kunjungan wisatawan, pada tahun 2019 terdapat jumlah kunjungan 1.176.087 Wisnu (Wisatawan Nusantara) dan 42.489 Wisman (Wisatawan Mancanegara) dengan total jumlah kunjungan 1.218.576, pada tahun 2020 terjadinya penurunan drastis yaitu 554.593 jumlah pengunjung ke Kabupaten Tanah Datar yang terdiri 551.085 Wisnu (Wisatawan Nusantara) sedangkan untuk Wisman (Wisatawan Mancanegara) hanya 3.508. Hal ini disebabkan dari dampak pandemi Covid-19. Berdasarkan data Disparpora Kabupaten Tanah Datar pada

bulan April dan Mei tidak adanya kunjungan wisatawan baik itu domestik maupun mancanegara. Hal ini disebabkan dari dampak pandemi Covid-19 karena adanya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dimana seluruh objek wisata ditutup untuk sementara waktu. Dan pada tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan mulai meningkat, yaitu 691.161 Wisatawan Nusantara) sedangkan (Wisatawan Mancanegara) baru 16 pengunjung.

Perkembangan pariwisata masih sangat tergantung pada keberadaan Istana Basa Pagaruyung, yang sampai saat ini masih belum tergantikan posisinya sebagai ikon pariwisata di Kabupaten Tanah Datar, bahkan di Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian bukan berarti pengembangan pariwisata hanya difokuskan pada Istana Basa Pagaruyung saja. Adapun arah pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tanah Datar sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional tahun 2005-2025:



Tabel 1.2
Arah dan Pentahapan Pebangunan Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2005-2021

Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJMD Ke-1 (2005-2010)	RPJMD Ke-2 (2010-2015)	RPJMD Ke-3 (2016-2021)	RPJMD Ke-4 (2021-2026)
Terwujudnya Tanah Datar sebagai daerah tujuan wisata nasional dan wisata internasional	Mewujudkan masyarakat yang sadar wisata sebagai landasan utama pengembangan pariwisata melalui kegiatan konsolidasi masyarakat agar terdapat pemahaman yang sama tentang pentingnya pariwisata bagi pembangunan daerah, dan mengupayakan terwujudnya pusat-pusat informasi wisata yang dilengkapi dengan fasilitas teknologi informasi yang memadai.	Mengembangkan objek-objek wisata yang telah ada dengan kegiatan renovasi dan pemugaran kembali, melalui peningkatan mutu prasarana jalan dan sarana perhubungan menuju objek-objek wisata tersebut. Serta peningkatan kualitas sarana listrik dan telekomunikasi yang dapat digunakan publik untuk mengunjungi objek-objek wisata tersebut. Meningkatkan program sadar wisata agar masyarakat dapat mendukung dan	Mengembangkan destinasi pariwisata halal berbasis budaya dan alam dalam mendukung pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengembangkan pariwisata berbasis keunggulan alam, budaya, kuliner, kearifan lokal dan membenahi utama dan pengelolaan pariwisata.	Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumber daya alam. Serta optimalisasi penyelenggaraan event pariwisata daerah melalui program satu nagari satu even

		berpartisipasi penuh terhadap pengembangan Tanah Datar sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional. Meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat untuk mendukung pariwisata, serta melengkapi sarana dan prasarana wisata yang memadai, sehingga menarik bagi para wisatawan untuk berkunjung dan tinggal lebih lama di Tanah Datar.	
--	--	--	--

Sumber: RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026

Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam pembangunan pariwisata yang berbasis adat, budaya dan sumber daya alam antara lain: melengkapi dan memperbaiki amenities dan aksesibilitas destinasi wisata, meningkatkan event wisata, meningkatkan promosi dan branding pariwisata daerah, memperkuat manajemen dan kelembagaan pariwisata, mendorong kolaborasi Bumrag dan Pokdarwis dalam pengelolaan desa wisata, penyusunan regulasi pengelolaan destinasi wisata daerah, mendorong keterlibatan masyarakat

dalam pengembangan pariwisata, mengembangkan *mass tourism*, pengembangan konsep pariwisata geopark, peningkatan SDM pelaku wisata, pengembangan konsep agrowisata, penguatan nilai-nilai kearifan lokal sebagai daya tarik wisata budaya, meningkatkan kualitas investasi dan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan pemahaman masyarakat dalam penanaman modal, dan meningkatkan promosi penanaman modal sektor pariwisata.

Pembangunan pariwisata dalam penyelenggaraan *One Nagari One Event* ini sebagai sumber ekonomi potensial yang akan memberi dampak berkembangnya sektor-sektor lainnya seperti akomodasi dan perhotelan, UMKM, agro industri, penyerapan tenaga kerja dan berbagai sektor lainnya. Sehingga dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan memperhatikan ketahanan budaya, kelestarian alam dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan serta melindungi tenaga kerja lokal.

Pelaksanaan “*One Nagari One Event*” yang pada tahun anggaran 2022 dilaksanakan pada 14 Nagari di Kabupaten Tanah Datar yang didorong oleh pemerintah daerah untuk menciptakan satu *event* guna menunjang kepariwisataan yang ada. Dalam *event* ini pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar juga bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung dan tim kurator *event* guna memberikan arahan untuk 14 Nagari yang ikut menggelar *event* tersebut. Tujuan dengan adanya inovasi “*One Nagari One Event*” ini untuk menggali, melestarikan dan mempromosikan kearifan lokal nagari melalui kelompok sadar wisata, sanggar-sanggar kesenian di nagari, kerajinan anak nagari, permainan anak nagari, klub olahraga nagari, UMKM dan lain sebagainya. Sehingga menjadi langkah besar dalam pengembangan pariwisata, budaya serta meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tanah Datar.

Salah satu tujuan dari inovasi kebijakan sektor publik adalah agar menjadi lebih responsif dalam menghadapi tuntutan dan memecahkan permasalahan publik. Menurut Bourgon dalam (Sururi, 2019) setiap inovasi diyakini dapat menciptakan peluang positif bagi tumbuhnya budaya kreatif, dalam hal ini perubahan organisasi sektor publik terjadi dalam berbagai aspek dan memberikan arah pada tujuan organisasi maupun hubungan antara berbagai bidang dalam ruang lingkup pemerintahan. Inovasi secara relevan dapat digunakan di sektor publik karena fungsi alternatifnya untuk mencari solusi baru atas persoalan lama yang tak kunjung tuntas. Paradigma inovasi kebijakan publik telah menjadi dikursus dan praktik dalam birokrasi pemerintahan. Dalam konteks paradigma atau cara pandang tersebut, kebijakan publik dapat dipandang sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan saling terkait yang dilakukan oleh pemerintah bersama *stakeholder* dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan urusan publik, masalah publik dan sumber daya yang ada untuk kepentingan bersama (Mulyadi, 2015).

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian terkait inovasi kebijakan melalui *One Nagari One Event*, seperti yang di ungkapkan Bupati Tanah Datar dalam (Redaksi, 2021) sektor pariwisata ini diyakini akan lebih cepat meningkatkan kembali perekonomian masyarakat. Sehingga menjadi salah satu aspek penting untuk melihat apakah dengan adanya inovasi dari program unggulan wisata ini dapat membangkitkan kembali sektor pariwisata dan seluruh pemangku kepentingan di sektor pariwisata. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan peneliti sebagai berikut: Bagaimana inovasi kebijakan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam pemulihan sektor pariwisata di tengah pandemi Covid-19 melalui *One Nagari One Event*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan serta menganalisis inovasi kebijakan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam pemulihan sektor pariwisata di tengah pandemi Covid-19 melalui *One Nagari One Event*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan dan menggambarkan bagaimana bentuk inovasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam pemulihan sektor pariwisata di tengah pandemi Covid-19. Sehingga sumber informasi yang ada dalam penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.

